

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang tergolong berkembang memiliki jumlah penduduk yang tinggi serta potensi sumber daya alam yang melimpah, tetapi kondisi tersebut belum sepenuhnya mampu mengatasi berbagai permasalahan pembangunan yang masih dihadapi, salah satunya adalah pengangguran (Zenika et al., 2022). Tingginya angka pengangguran memiliki dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap meningkatnya kemiskinan, kriminalitas dan permasalahan sosial politik yang ada. Indonesia berada pada peringkat ketujuh tingkat pengangguran terbuka dikawasan Asia dengan nilai sekitar 5 persen, yang menunjukkan bahwa permasalahan pengangguran masih menjadi tantangan pembangunan nasional (Diandra, 2025).

Pengangguran sering dikaitkan melalui berbagai faktor ekonomi yang saling berkaitan dan memengaruhi kondisi pasar tenaga kerja. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pengangguran antara lain upah minimum, indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan penduduk. Tingginya tingkat pengangguran tidak hanya mencerminkan ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja, tetapi juga menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian, baik pada tingkat individu maupun masyarakat (Zuliasari & Rachmawati, 2021).

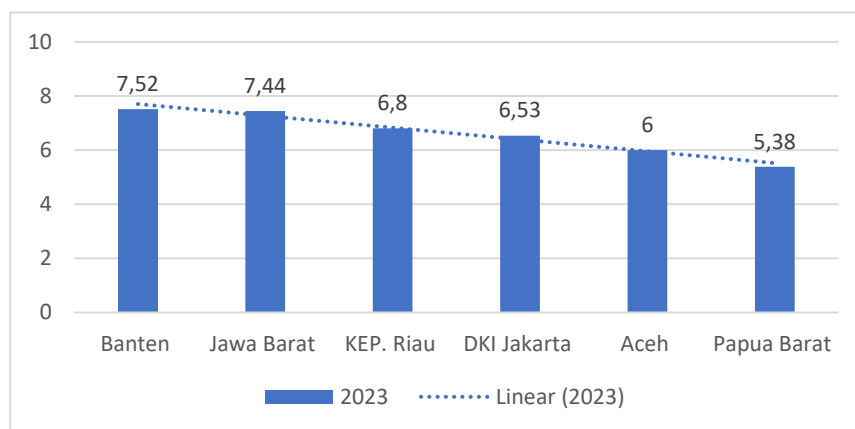
Pengangguran merupakan permasalahan makroekonomi yang memiliki dampak langsung terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat. Kondisi ini menyebabkan tenaga kerja tidak dapat mengoptimalkan potensi dan kontribusi

ekonominya secara optimal, yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya produktivitas serta tingkat pendapatan atau upah yang diterima.

Permasalahan tingkat pengangguran terbuka terjadi pada beberapa wilayah lainnya di Indonesia. Salah satu provinsi yang mengalami tingkat pengangguran terbuka yang relatif tinggi pada tahun 2023 adalah provinsi Banten, dari lima provinsi lainnya yang juga menunjukkan presentase pengangguran yang cukup besar.

Selain itu, Provinsi Banten sebagai wilayah penyangga ibu kota memiliki tingkat urbanisasi yang cukup tinggi sehingga banyak penduduk dari daerah lain datang untuk mencari pekerjaan, terutama pada kawasan industri seperti Tangerang, Serang, dan Cilegon. Namun, peningkatan jumlah pencari kerja tersebut tidak selalu diimbangi dengan perluasan kesempatan kerja yang memadai sehingga menimbulkan tekanan pada pasar tenaga kerja dan meningkatkan tingkat pengangguran terbuka. Tingginya tingkat pengangguran di Provinsi Banten juga menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja belum berjalan secara optimal dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah angkatan kerja (Simanjuntak et al., 2025).

Gambar 1.1 Presentase Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Tahun 2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi, 2023

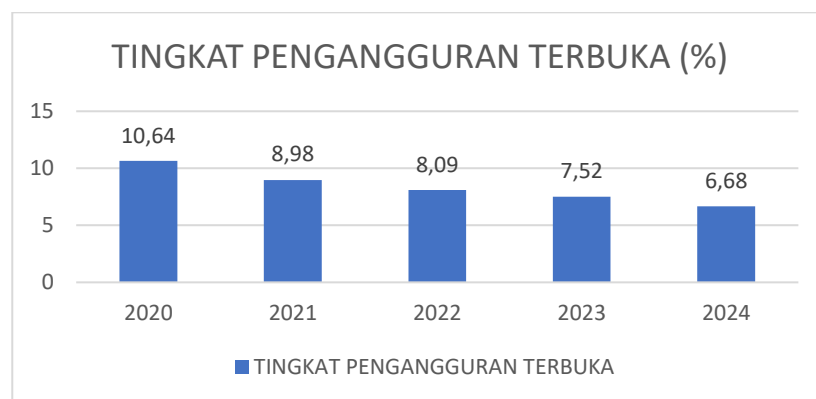
Berdasarkan gambar 1.1 data diatas yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut, salah satu presentase tingkat pengangguran terbuka yang tinggi yaitu di Provinsi Banten pada tahun 2023, Provinsi Banten menduduki peringkat ke-1 dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia, dengan nilai rata-rata 7,52 persen per agustus 2023. Posisi tersebut diikuti oleh Provinsi Jawa Barat yang memiliki tingkat pengangguran terbuka dengan nilai rata-rata 7,44 persen per agustus 2023. Selanjutnya, disusul kepulauan riau dengan nilai rata-rata 6,80 persen per agustus 2023. Tingginya tingkat pengangguran terbuka diketiga provinsi tersebut menunjukkan adanya permasalahan ketenagakerjaan.

Kondisi tingginya tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten dipengaruhi oleh ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi di Indonesia karena jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia belum mampu menyerap angkatan kerja yang terus meningkat. Kondisi tersebut menyebabkan persaingan kerja menjadi semakin tinggi dan berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Banten (Wulandari et al., 2024).

Berdasarkan gambar 1.2 data di bawah ini yang didapat dari (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024), tingkat pengangguran terbuka pada provinsi banten mengalami fluktuatif pada rentang tahun 2020-2024. Pesentase kenaikan dan penurunan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten pada tahun 2020 dengan nilai 10,64 persen, pada tahun 2021 sebesar 8,98 persen, pada tahun 2022 dengan nilai 8,09 persen. Tren tersebut berlanjut pada tahun 2023 dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,52 persen, meskipun Provinsi Banten masih

menempati posisi tertinggi tingkat pengangguran terbuka dipulau jawa. Pada tahun 2024, tingkat pengangguran terbuka kembali mengalami penurunan menjadi 6,68 persen. Namun, angka tersebut masih berada diatas tingkat pengangguran nasional, yang menunjukkan bahwa permasalahan pengangguran di Provinsi Banten masih memerlukan perhatian yang serius dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan.

Gambar 1.2 Presentase Tingkat Pengangguran Terbuka (%) di Provinsi Banten Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2024

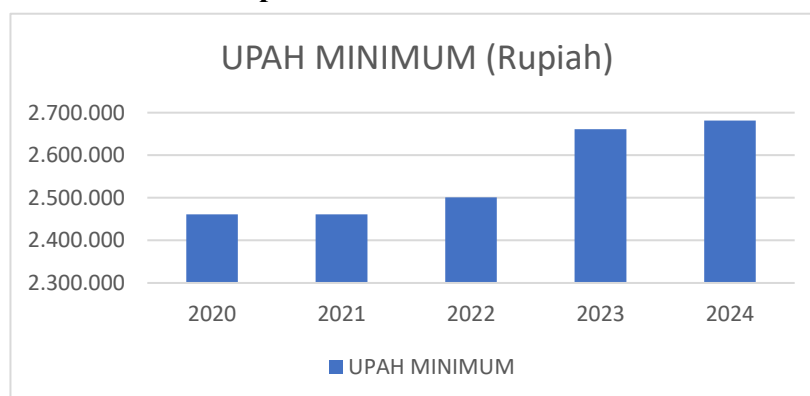
Pada periode 2020 – 2024, kondisi pengangguran di Provinsi Banten juga dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Penurunan aktivitas ekonomi menyebabkan banyak perusahaan melakukan efisiensi melalui pengurangan tenaga kerja untuk menekan biaya produksi. Dampak tersebut terutama dirasakan pada sektor industri pengolahan, perdagangan, dan jasa yang merupakan sektor utama penyerapan tenaga kerja di Provinsi Banten. Kondisi ini menyebabkan tingkat pengangguran terbuka Provinsi Banten meningkat cukup tinggi pada tahun 2020 sebelum akhirnya mengalami penurunan secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya.

Ketidaksesuaian antara kualitas sumber daya manusia dengan kebutuhan dunia industri juga menjadi salah satu faktor penyebab tingginya pengangguran

terbuka di Provinsi Banten. Pertumbuhan penduduk yang tinggi tanpa diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai dapat menyebabkan tenaga kerja sulit terserap di pasar kerja. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan, dan produktivitas tenaga kerja agar mampu memenuhi kebutuhan pasar kerja (Wulandari et al., 2024).

Dalam upaya mengatasi permasalahan pengangguran, salah satu faktor yang perlu diperhatikan adalah kebijakan upah minimum karena memiliki pengaruh terhadap kondisi pasar tenaga kerja. Peningkatan upah minimum dapat berdampak pada naiknya tingkat upah yang harus dibayarkan oleh perusahaan, sehingga berimplikasi pada peningkatan biaya produksi. Kondisi ini mendorong perusahaan untuk melakukan efisiensi, salah satunya melalui pengurangan jumlah tenaga kerja. Akibatnya, jika tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas dan kemampuan perusahaan, kenaikan upah minimum maka berpotensi meningkatkan tingkat pengangguran.

Gambar 1.3 Presentase Upah Minimum di Provinsi Banten Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2024

Berdasarkan gambar 1.3 data di atas yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS), Upah Minimum Regional (UMR) dalam 5 tahun terakhir mengalami kenaikan

tiap tahunnya. Dari Rp.2.460.000 pada tahun 2020 menjadi Rp 2.681.000 pada tahun 2024. Kenaikan upah minimum tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan memperbaiki taraf hidup masyarakat. Namun, kebijakan upah yang terus meningkat dapat berdampak berbeda pada penyerapan tenaga kerja apabila tidak diimbangi dengan peningkatan output produksi atau produktivitas perusahaan.

Hukum permintaan dan penawaran dalam pasar tenaga kerja menjelaskan bahwa tingkat upah memiliki pengaruh terhadap jumlah tenaga kerja menjelaskan bahwa tingkat upah memiliki pengaruh terhadap jumlah tenaga kerja yang diminta dan ditawarkan. Semakin tinggi upah minimum, maka jumlah tenaga kerja yang diminta oleh perusahaan cenderung menurun, sedangkan ketika tingkat upah lebih rendah, permintaan terhadap tenaga kerja akan meningkat. Sebaliknya dari sisi penawaran, kenaikan tingkat upah justru mendorong semakin banyak tenaga kerja untuk menawarkan jasanya di pasar kerja (Vallendzo et al., 2020).

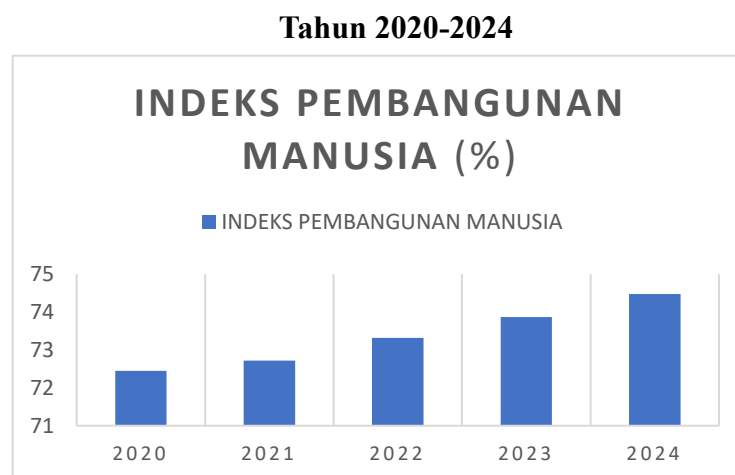
Selain memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan pekerja, kenaikan upah minimum juga dapat memengaruhi tingkat pengangguran terbuka. Dari sisi perusahaan, peningkatan upah minimum menyebabkan meningkatnya biaya produksi sehingga beberapa perusahaan cenderung melakukan pengurangan jumlah tenaga kerja untuk menekan biaya operasional. Kondisi tersebut dapat mengurangi kemampuan perusahaan dalam menyerap tenaga kerja baru dan berpotensi meningkatkan tingkat pengangguran terbuka (Wulandari et al., 2024).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga merupakan salah satu faktor yang berkaitan dengan tingkat pengangguran terbuka. Kemajuan pembangunan manusia tercermin melalui nilai IPM, yang digunakan sebagai indikator untuk

menggambarkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, meliputi aspek pendidikan, kesehatan dan standar hidup layak. Perkembangan IPM yang tidak diiringi dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai berpotensi meningkatkan jumlah pengangguran terbuka, terutama pada kelompok tenaga kerja terdidik.

Selama lima tahun terakhir, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan tren peningkatan, sebagaimana yang dapat dilihat dari grafik 1.4 yang menggambarkan kenaikan yang terjadi di pemerintahan Provinsi Banten, dimana setiap tahunnya terjadi perbaikan pada capaian pembangunan manusia sebagai hasil dari peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak.

Gambar 1.4. Presentase Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2024

Berdasarkan gambar 1.4 data yang di dapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) presentase indeks pembangunan manusia di Provinsi Banten tersebut, menunjukkan bahwa Provinsi Banten menunjukkan capaian yang cukup baik dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Peningkatan IPM di Provinsi Banten mengindikasikan bahwa akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan semakin membaik, serta adanya peningkatan kemampuan ekonomi yang

tercermin dari daya beli masyarakat. Peningkatan kualitas pembangunan manusia perlu dikaji lebih lanjut keterkaitannya dengan kondisi sosial dan ekonomi lainnya, khususnya pada penyerapan tenaga kerja dan pengurangan tingkat pengangguran terbuka.

Salah satu faktor yang mendorong tingginya tingkat pengangguran terbuka adalah keterbatasan ketersediaan lapangan kerja yang belum mampu menyerap tenaga kerja secara optimal, terutama ditengah pertumbuhan penduduk usia produktif yang terus meningkat (Septiana & Asmara, 2024). Pertumbuhan penduduk dapat diartikan sebagai peningkatan atau penurunan jumlah penduduk di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu jika dibandingkan dengan kondisi pada periode sebelumnya. Apabila terjadi peningkatan jumlah penduduk yang bertambah secara pesat, maka diperlukan adanya berbagai kebijakan dan strategi yang efektif untuk mengantisipasi serta mengendalikan adanya dampak yang ditimbulkan.

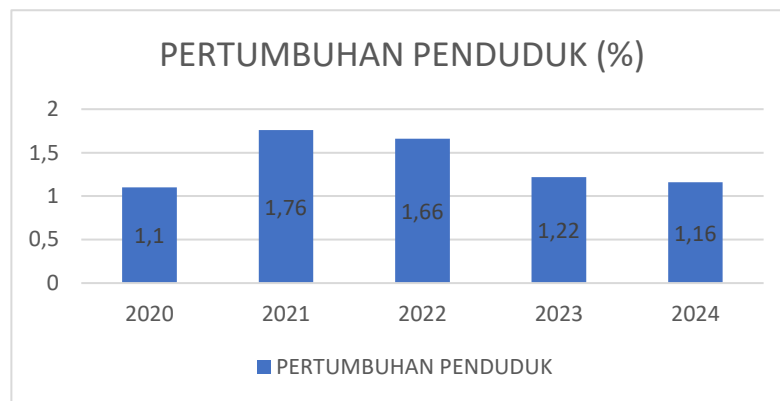
Peningkatan kualitas pembangunan manusia pada dasarnya dapat meningkatkan produktivitas dan kemampuan tenaga kerja dalam memperoleh pekerjaan. Namun, apabila peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak diimbangi dengan perluasan kesempatan kerja yang memadai, maka dapat memunculkan pengangguran terdidik. Oleh karena itu, peningkatan IPM perlu disertai dengan kebijakan yang mampu memperluas lapangan pekerjaan agar tenaga kerja yang memiliki kualitas lebih baik dapat terserap secara optimal di pasar kerja (Wulandari et al., 2024).

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dapat menimbulkan permasalahan, terutama apabila tidak diimbangi dengan perencanaan pembangunan yang memadai. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi berpotensi pada

ketersediaan lapangan pekerjaan, layanan publik dan sumber daya yang dapat memicu permasalahan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pengendalian pertumbuhan penduduk menjadi hal penting dalam upaya menjaga keseimbangan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 1.5 Presentase Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Banten Tahun

2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2024

Berdasarkan gambar 1.5 data yang didapat dari BPS, pertumbuhan penduduk provinsi banten dari tahun ketahun berfluktuatif selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, laju pertumbuhan penduduk tercatat sebesar 1,1 kemudian ditahun 2021 menjadi 1,76 selanjutnya, laju pertumbuhan penduduk tersebut mengalami penurunan ditahun 2022 menjadi 1,66, 1,22 ditahun 2023 lalu Kembali menurun ditahun 2024 sebesar 1,16. Meskipun pertumbuhan penduduk di provinsi banten tersebut mengalami penurunan tiap tahunnya, isu ketenagakerjaan masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Banten menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun, namun kondisi tersebut belum sepenuhnya dapat menurunkan tingkat pengangguran terbuka secara signifikan jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka nasional. Hal ini

mengindikasikan bahwa penurunan pertumbuhan penduduk belum secara langsung diikuti oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja yang optimal.

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat juga menjadi faktor yang memengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten. Peningkatan jumlah penduduk akan menyebabkan bertambahnya jumlah angkatan kerja. Namun, apabila peningkatan jumlah angkatan kerja tersebut tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan pekerjaan yang memadai, maka jumlah pengangguran akan semakin meningkat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk dapat memberikan tekanan terhadap pasar tenaga kerja apabila kesempatan kerja yang tersedia belum mampu menyerap angkatan kerja secara optimal (Simanjuntak et al., 2025).

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh (Silvia & Malangkas, 2022) yang menganalisis pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Sulawesi Utara, menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran, yang mengindikasikan bahwa kenaikan upah minimum berpotensi meningkatkan biaya produksi sehingga mendorong Perusahaan melakukan efisiensi tenaga kerja.

Penelitian yang dilakukan oleh (Lestari & Nilasari, 2025) menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran, yang berarti peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat mampu menekan angka pengangguran melalui peningkatan produktifitas tenaga kerja. Sementara itu,

variabel ekonomi seperti upah menunjukkan pengaruh yang bervariasi tergantung pada kondisi wilayah struktur pasar tenaga kerja.

Penelitian yang dilakukan oleh (Agnesia et al., 2023) menemukan bahwa pertumbuhan penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di kota Pekanbaru, yang mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah penduduk dapat imbangi dengan penyerapan tenaga kerja apabila didukung oleh kesempatan kerja dan investasi yang memadai.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat pengangguran terbuka tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan fenomena yang tidak sederhana dan dipengaruhi oleh keterkaitan berbagai faktor ekonomi dan sosial. Kebijakan upah minimum memengaruhi struktur biaya ketenagakerjaan serta kemampuan pelaku usaha dalam menyerap tenaga kerja, sedangkan indeks pembangunan manusia menggambarkan kualitas sumber daya manusia yang berperan dalam menentukan produktivitas dan peluang individu untuk terserap di pasar kerja. Sementara, pertumbuhan penduduk berhubungan dengan dinamika penawaran tenaga kerja, di mana bertambahnya jumlah penduduk cenderung meningkatkan jumlah angkatan kerja dan dapat menimbulkan tekanan pada pasar tenaga kerja apabila tidak disertai dengan perluasan kesempatan kerja yang memadai.

Meskipun tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten mengalami penurunan selama periode 2021–2024, permasalahan ketenagakerjaan masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Tingginya jumlah angkatan kerja, keterbatasan lapangan pekerjaan, ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja

dengan kebutuhan industri, serta tekanan biaya produksi akibat kenaikan upah minimum menjadi beberapa faktor yang menyebabkan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten masih berada di atas rata-rata nasional. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas kesempatan kerja, dan mendorong investasi agar tingkat pengangguran terbuka dapat terus ditekan.

Tingginya tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, seperti tingginya jumlah angkatan kerja, keterbatasan lapangan pekerjaan, serta belum optimalnya penyerapan tenaga kerja oleh sektor industri. Sebagai salah satu wilayah penyangga ibu kota dan kawasan industri, Provinsi Banten memiliki daya tarik yang besar bagi masyarakat untuk mencari pekerjaan. Namun, peningkatan jumlah pencari kerja tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan pertumbuhan kesempatan kerja yang memadai sehingga menyebabkan persaingan kerja semakin tinggi dan meningkatkan tingkat pengangguran terbuka.

Meskipun Provinsi Banten dikenal sebagai salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia, keberadaan industri tersebut belum sepenuhnya mampu menyerap tenaga kerja lokal secara optimal. Sebagian perusahaan lebih membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan khusus dan pengalaman tertentu, sehingga banyak tenaga kerja lokal yang belum memenuhi kualifikasi industri. Selain itu, tingginya arus urbanisasi dari daerah lain menyebabkan persaingan kerja di Provinsi Banten semakin ketat.

Selain itu, ketidaksesuaian antara kualitas sumber daya manusia dengan kebutuhan dunia kerja juga menjadi penyebab tingginya pengangguran terbuka di Provinsi Banten. Sebagian perusahaan lebih membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan kompetensi tertentu, sedangkan sebagian angkatan kerja yang tersedia belum sepenuhnya memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Kondisi tersebut menyebabkan tenaga kerja sulit terserap secara optimal, terutama pada sektor industri modern yang menuntut kemampuan teknis dan produktivitas yang tinggi.

Tingginya urbanisasi di Provinsi Banten menyebabkan banyak tenaga kerja dari luar daerah datang untuk mencari pekerjaan, khususnya pada kawasan industri seperti Tangerang dan Cilegon. Kondisi tersebut menyebabkan tenaga kerja lokal harus bersaing dengan tenaga kerja pendatang yang memiliki keterampilan dan pengalaman kerja yang lebih sesuai dengan kebutuhan industri sehingga penyerapan tenaga kerja lokal belum berjalan secara optimal.

Kenaikan upah minimum juga dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten. Peningkatan upah minimum dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja, namun di sisi lain juga dapat meningkatkan biaya produksi perusahaan. Apabila perusahaan tidak mampu menyesuaikan biaya produksi dengan peningkatan produktivitas, maka perusahaan cenderung melakukan efisiensi tenaga kerja atau membatasi perekrutan tenaga kerja baru, sehingga berpotensi meningkatkan tingkat pengangguran terbuka.

Selain faktor ekonomi, pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang tinggi di Provinsi Banten turut memberikan tekanan terhadap pasar tenaga kerja.

Bertambahnya jumlah penduduk usia produktif menyebabkan jumlah angkatan kerja terus meningkat setiap tahunnya. Namun, apabila pertumbuhan penduduk tersebut tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka jumlah pengangguran terbuka akan cenderung meningkat.

Perkembangan teknologi dan otomatisasi industri juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingginya tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten. Penggunaan teknologi modern dan mesin produksi menyebabkan beberapa jenis pekerjaan yang sebelumnya membutuhkan banyak tenaga kerja mulai tergantikan oleh teknologi. Kondisi ini menyebabkan tenaga kerja dengan keterampilan rendah semakin sulit bersaing dalam pasar kerja dan berpotensi meningkatkan jumlah pengangguran terbuka.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kebijakan yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong investasi dan pengembangan sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih optimal. Dengan demikian, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten diharapkan dapat mengalami penurunan secara berkelanjutan.

Hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan perbedaan temuan serta keterbatasan kajian yang menganalisis ketiga variabel tersebut secara simultan, khususnya pada tingkat Provinsi Banten dan dalam rentang waktu yang relatif panjang. Kondisi ini menunjukkan adanya celah penelitian (*research gap*) yang perlu dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan menganalisis secara simultan pengaruh upah minimum, indeks pembangunan manusia, dan pertumbuhan penduduk terhadap tingkat pengangguran terbuka di

Provinsi Banten selama periode 2010-2024, dengan penekanan analisis pada kondisi pengangguran tahun 2023. Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup wilayah kajian yang dibatasi pada Provinsi Banten, penggunaan data sekunder, serta pembatasan variabel penelitian, sehingga hasil penelitian ini hanya mencerminkan kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Banten, namun tetap diharapkan mampu memberikan gambaran empiris yang relevan sebagai dasar pertimbangan dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan daerah.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Upah minimum berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Banten?
2. Apakah Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Banten?
3. Apakah Pertumbuhan Penduduk berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Banten?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Upah Minimum berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Banten.
2. Untuk menganalisis Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Banten.
3. Untuk menganalisis Pertumbuhan Penduduk berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Banten.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis berharap hasil penelitian yang diperoleh dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi Penulis, penelitian ini memberikan pemahaman akademis dan pengalaman ilmiah dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka, khususnya pengaruh upah minimum, indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan penduduk melalui pendekatan kuantitatif dan analisis empiris.
- b. Bagi Universitas dan kalangan akademisi, penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan serta bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang membahas isu pengangguran, upah minimum, indeks pembangunan manusia, dan pertumbuhan penduduk yang serupa dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintahan Daerah, penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi dan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah Provinsi Banten dalam merumuskan serta mengevaluasi kebijakan ketenagakerjaan, khususnya yang berkaitan dengan penetapan upah minimum, peningkatan kualitas pembangunan manusia dan pengendalian pertumbuhan penduduk dalam Upaya menurunkan tingkat pengangguran terbuka.
- b. Bagi Pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca, akademisi, serta pihak-pihak yang memiliki kepentingan

terhadap permasalahan ketenagakerjaan, serta dapat dijadikan sebagai referensi atau bahan rujukan dalam kajian yang berkaitan dengan upah minimum, Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan penduduk dan tingkat pengangguran terbuka.

1.5 Ruang Lingkup

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), periode penelitian yang digunakan selama rentang tahun 2010-2024. Fokus penelitian ini adalah menganalisis tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten, penggunaan data sekunder serta pembatasan variabel penelitian. Selain itu, penelitian ini dibatasi pada wilayah provinsi banten dengan unit analisis tingkat provinsi . Variabel independent yang digunakan meliputi upah minimum, indeks pembangunan manusia, dan pertumbuhan penduduk, sedangkan variabel dependen adalah tingkat pengangguran terbuka.